



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 025/MENKES/SK/I/2008**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN ANAK, KESEHATAN  
REPRODUKSI, PENANGGULANGAN TBC DAN PENYAKIT BERPOTENSI WABAH,  
SERTA PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN KELUARGA MISKIN**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : Bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 4 Kesepakatan Kerja Sama antara Departemen Kesehatan Republik Indonesia dengan Pengurus Besar Nahdlatul 'Ulama Nomor 102/Menkes/KB/II/2006 dan Nomor 47/C/PP. PKNU/II/2006 tentang Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak, Kesehatan Reproduksi, Penanggulangan TBC dan Penyakit Berpotensi Wabah, serta Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin, perlu dibentuk tim dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun. 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3298);
  2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
  3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  5. Kepmenkes RI No. 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
  6. Kepmenkes RI No. 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
  7. Permenkes RI No. 1275/Menkes/Per/2005 tentang Struktur Organisasi Departemen Kesehatan;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

8. Kepmenkes RI No. 331/Menkes/SK/V/2006 tentang Rencana Strategis Departemen Kesehatan Tahun 2005 – 2009;
9. Kepmenkes RI No. 564/Menkes/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga;
10. Kepmenkes RI No. 867/Menkes/SK/XI/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pembinaan Pos Kesehatan Pesantren;
11. Kepmenkes RI No. 1468/Menkes/SK/XII/2006 tentang Rencana Pembangunan Kesehatan Tahun 2007 – 2009;
12. Kepmenkes RI No. 417/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (ASKESKIN) 2007;

**Memperhatikan :** Kesepakatan kerja sama antara Departemen Kesehatan Republik Indonesia dengan Pengurus Besar Nahdlatul 'Ulama Nomor 102/Menkes/KB/II/2006 dan Nomor 47/C/PP. PKNU/II/2006 tentang Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak, Kesehatan Reproduksi, Penanggulangan TBC dan Penyakit Berpotensi Wabah, serta Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**Kesatu :** Membentuk tim peningkatan kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi, penanggulangan TB dan penyakit berpotensi wabah serta peningkatan pelayanan kesehatan Askeskin dengan dibantu oleh 3 (tiga) kelompok kerja (Pokja) sebagai berikut:

1. Pokja I : Kesehatan Ibu dan Anak, Kesehatan Reproduksi
2. Pokja II : Penanggulangan TB dan Penyakit Berpotensi Wabah
3. Pokja III : Pelayanan Kesehatan Gakin.

**Kedua :** Susunan keanggotaan Tim dan Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu meliputi:

- I. Pelindung : 1. Menteri Kesehatan RI  
2. Ketua Umum PBNU
- II. Pengarah  
Ketua : Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat  
Anggota : 1. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan RI  
2. Sekretaris Jenderal PBNU  
3. Direktur Jenderal P2PL



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

III. Pelaksana

- Koordinator : dr. Edi Suranto, MPH  
(Ses. Ditjen Bina Kesmas)
- Ketua : dr. Bambang Sardjono, MPH  
(Dir. Bina Kesehatan Komunitas)
- Wakil Ketua : Dr. Syahrial Syarif, MPA (Ketua LPK NU)
- Sekretaris I : Kasubdit. IKD UKBM Binakesmas
- Sekretaris II : dr. Wan Nedra Kamarudin, SpA (LPK NU)
- Anggota : 1. dr. Sri Hermiyanti, MSc  
(Dir. Bina Kesehatan Ibu)
2. dr. Hj. Fatni Sulani, DTM & H, Msi  
(Dir. Bina Kesehatan Anak)
3. dr. Ina Hernawati, MPH  
(Dir. Bina Gizi Masyarakat)
4. dr. Untung Suseno Sutardjo, M.Kes  
(Dir. Bina Kesehatan Kerja)
5. dr. Abidinsyah Siregar, DHSM, M.Kes  
(Ka.Pus. Promkes)
6. Ridha V. Hutagalung, SH. MH  
(Kabag. Hukormas Set. Ditjen Bina Kesmas)
7. I.G. Bagus Sarjana, SE. M.Kes  
(Kabag. Umum & Kepegawaian Set. Ditjen Bina Kesmas)
8. Wiwiek Widarti, SKM, MM  
(Kabag. Keuangan Set. Ditjen Bina Kesmas)
9. Sri Andewi, SKM. M.Kes  
(Kasubag. Humas Set. Ditjen Bina Kesmas)
10. Drs. Fathan Subechi (LPNU)
11. Drs. Munief Attamimi (LPNU)
12. Dra.Khofifah Indarparawansa (Muslimat NU)
13. Dra. Maria Ulfa Ansor (Fatayat NU)
14. Drs. Hamid Syarif (RMI)
15. Drs. Mabroer, MS (PP LAZIS NU)

IV. Pokja I

- Ketua : Dr. Sri Hermiyanti, MSc (Dir. Bina Kesehatan Ibu)
- Sekretaris : Dra. Ratu Dian Hatifah (Fatayat NU)
- Anggota : 1. Dr. Lucas C. Hermawan M.Kes  
(Ka.Subdit. Bina Kes. Ibu Bersalin & Nifas)
2. Dr. H.R. Dedi Kuswenda, M.Kes (Ka.Subdit Bina Kes. Maternal dengan Pencegahan komplikasi)
3. dr. Aragar Putri, MRDM  
(Ka.Subdit. Bina Kes. KB)
4. Dr. Kirana Pritasari, MQIH  
(Ka.Subdit. Bina Kes. Anak Usia Remaja)
5. Dr. Erna Mulati, MSc. CMFM  
(Ka.Subdit. Bina Kes. Balita & Anak Pra Sekolah)



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

6. Ir. Mohammad Nasir, MKM  
(Ka. Subdit. Bina Kes. Anak Usia Sekolah)
7. Dr. Penina Regina Beben, MPH  
(Ka. Subdit. Bina Kes. Anak Khusus)
8. Dr. Rinni Yudhi Pratiwi, MPET  
(Kasubdit. Bina Kesehatan Remaja)
9. Ir. Tatang Sahibul Falah, MSc  
(Ka. Subdit. Kewaspadaan Gizi)
10. Rita Kemalawati, MCN  
(Ka. Subdit. Bina Gizi Mikro)
11. Bidang Kemitraan & PSM Promosi Kesehatan
12. dr. Trisnawati G. Loho, MPH  
(Ka. Subdit. Bina Perlindungan Kes. Reproduksi)
13. Dr. Dina Dariana, MS  
(Ka. Subdit. Bina Kedokteran Kerja)
14. Drs. Munief Attamimi (LPNU)
15. Drs. Sultan Fathani (RMI)
16. Farida Solahudin Wahid (Muslimat NU)
17. Lulu Turoya, S.Kom (LPP NU)

V. Pokja II

- Ketua : Dr. Tjandra Yoga Aditama, Sp.P(K), MARS, DTM & H  
(Dir. P2ML)
- Sekretaris : Drg. Fauziah Asim, M.Kes (LPK NU)
- Anggota :
  1. Dr. Elizabeth Jane Soepardi, MPH, DSC  
(Ka. Subdit. P2 TB)
  2. Dr. Nunung B. Priyatni, M. Epid  
(Ka. Subdit. P2 Diare, Kecacingan & ISPL)
  3. dr. Arie Bratasena  
(Ka. Subdit. P2 ISPA)
  4. dr. Rita Kusriastuti, MSc  
(Ka. Subdit. Malaria)
  5. DR. dr. Toni Wandra, M.Kes  
(Ka. Subdit. Arbovirosis)
  6. drh. Wilfried Purba, M.Kes  
(Ka. Subdit. Zoonosis)
  7. Dr. Carmelia Basri, M.Epid  
(Ka. Subdit. Imunisasi)
  8. Drg. Hermanto Setio Hadi, MS  
(Ka. Subdit. Bina Upaya Kes. Perkotaan dan Olahraga)
  9. Dr. Bambang Tarupolo, MKM  
(Ka. Subdit. Bina Promosi Kesehatan Kerja)
  10. Drs. Ahmad Zainus Sholeh (RMI)
  11. Dra. Awin Tammah (Fatayat NU)
  12. dr. Alfiyan (LPK NU)
  13. Anggi (LKK NU)
  14. Drs. A. Sodik Noor (LP NU)



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

15. Dr. Mustafid Dahlan (LPK NU)
16. Drs. Muhtar Hadyu (GP ANSOR)
17. Sofiyul Arif (Lesbumi NU)

#### VI. Pokja III

- Ketua : dr. H.A. Chalik Masulili, MSc  
(Ka. Pusat Pembiayaan & Jaminan Kesehatan)
- Sekretaris : Drs. Fathan Subechi (LP NU)
- Anggota :
  1. Drg. Kartini Rustandi, M.Kes  
(Ka. Subdit. Bina Kesehatan DTPK)
  2. Drg. Usman Sumantri, MSc  
(Kabid. Kebersertaan, Pusat PJK)
  3. DR. Atikah Adyas, SKM, MDM  
(Kabid. Pembiayaan, Pusat PJK)
  4. Dr. Kalsum Komaryani, MPPM  
(Ka. Subbid. Kel. Informal Bid. Kebersertaan, Pusat PJK)
  5. Herlinawati, SKM, MSc (PH)  
(Kasubag. Sistem Informasi & Monev Bag. TU, Pusat PJK)
  6. Drg. Doni Arianto, MKM  
(Ka. Subbid. Kel. Formal Bid Kebersertaan, Pusat PJK)
  7. dr. Kuwat Sri Hudoyo, MS  
(Kabag. P&I, Set. Ditjen Bina Kesmas)
  8. P.A. Kodrat Pramudho, SKM, M.Kes  
(Kabid. Kemitraan & Peran serta, Promkes)
  9. Drs. Abdullah Mas'ud (RMI)
  10. Dra. Emmatul Qudsiyah (Fatayat NU)
  11. dr. Alfian (LPK NU)
  12. Drs. Nurhasan, MA (LAZIS NU)
  13. Otong Abdurahman (LKK NU)
  14. Mubayyinah (LPP NU)

- Ketiga : Tugas Pelaksana :
- Mengkoordinasikan Pokja - Pokja dalam penyusunan rencana program dalam rangka mempercepat tercapainya 17 (tujuh belas) sasaran Depkes yang relevan;
  - Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelaksanaan dari Pokja – Pokja;
  - Menyusun dan melaporkan kegiatan yang dilaksanakan kepada Menkes RI.

- Keempat : Tugas Pokja :
- Menyusun rencana kerja kegiatan dalam rangka meningkatkan akses dan rujukan kesehatan Ibu dan Anak, kesehatan reproduksi, penanggulangan TBC & Penyakit berpotensi wabah serta peningkatan pelayanan kesehatan keluarga miskin melalui Askeskin sebagai bagian dari kegiatan penurunan angka kematian Ibu dan Anak, kesakitan TBC dan penyakit wabah;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- Menyusun standar pelayanan pedoman/juknis/juklak yang diperlukan sesuai ruang lingkup kegiatan agar memperhatikan aspek etikolegal dan standar profesi terkait ;
- Menyiapkan materi informasi sebagai bahan penyuluhan kepada masyarakat;
- Memfasilitasi dan melaksanakan pendampingan yang terkait dengan teknis program;
- Menyebarkan informasi melalui penyuluhan kepada masyarakat didalam kegiatan keagamaan yang merupakan tanggung jawab masing-masing;
- Menyusun dan melaporkan kegiatan Pokja kepada Ketua Pelaksana;
- Menggerakkan kader NU dan tenaga kesehatan terkait/setempat.

**Kelima** : Pembiayaan

- Penyusunan standar pelayanan pedoman/juklak/juknis penyuluhan dan evaluasi kegiatan dibebankan pada anggaran Depkes;
- Untuk penyebaran informasi melalui penyuluhan kepada masyarakat dalam kegiatan keagamaan dan penggerakan Kader NU merupakan tanggung jawab PBNU.

**Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di J a k a r t a  
pada tanggal 15 Januari 2008



MENTERI KESEHATAN RI

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)

**Tembusan,**

1. Para Direktur Jenderal di lingkungan Dep.Kes. RI.
2. Kepala Badan PPSDM Kesehatan.
3. Badan Litbangkes.
4. Inspektur Jenderal Dep.Kes. RI
5. Ybs. Untuk dilaksanakan.